

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Halim Talli. (2014). *Pengelolaan administrasi perkara menuju peradilan agama yang mandiri*. Alauddin University Press.
- Anisa Darania. (2024). *Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi penjelasan e-Court dan e-litigation*. CV. Adanu Abimata.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi. (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Dimiyati Khudzaifah, (2015). *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Marianne Termorshuizen. (1999). *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Martha Eri Safira. (2017). *Hukum Acara Perdata*. CV. Nata Karya, Ponorogo.
- Meliala, D. S. (2012). *Hukum perdata dalam perspektif BW* (Ed. rev.). Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad Syaifuddin, Turatmiyah, & Yahanan, (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

- M. Yahya Harahap, (2023). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. PT. Kharisma Putra Utama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Salim HS. (2008). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum hak asasi manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*.
- Soemiyati. (1996). *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. IAIN Parepare Nusantara Press.

B. Jurnal

- Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru*. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46-59.
- Barokah, E. (2023). *Proses Sita Jaminan Di Dalam Pengadilan Negeri Terhadap Debitur Wanprestasi*. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 852-862.
- Buana, M. S., & Kepastian, H. T. M. A. A. (2010). *Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, (Doctoral dissertation, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).
- Cahyani, A. I. (2019). *Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia*. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119-132.
- Dewa Gede Atmaja. (2018). *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 12(2).
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Ibnu Subarkah. (2011). *Dilematika Kekuasaan Lembaga Peradilan Dan Keadilan Dalam Frame Desentralisasi Pemerintahan (Suatu Common Sense)*. *Jurnal Konstitusi*, 4(1).

- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum*. *Crepido*, 1(1), 13-22.
- Kenedi, J. (2019). *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian*. *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 92-106.
- Kojungan, V. (2015). *Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Sita Jaminan atas Harta Perkawinan dalam Perkara Perceraian*. (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Mahardika, Z. P. (2019). *Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Pengungsi Anak*. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(2), 126-147.
- Merriam Webster. (1996). *Dictionary of Law*. Merriam Webster, Springfield, Massachusetts.
- Pratama, G. F., & Suryono, A. (2023). *Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1).
- Prayogo, R. T. (2016). *Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-201.

- Rahmi, D. (2013). *Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah*. Syariah : Jurnal Hukum dan Pemikiran, 13(2).
- Ruhimat, M. (2017). *Teori syirkah dalam pembagian harta bersama bagi istri yang berkarir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta prakteknya di pengadilan agama*. Jurnal 'Adliya, 11(1).
- Sallatu, A. (2019). *Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)*. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Santriati, A. T. (2020). *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak*. El Wahdah, 1(1), 1-13.
- Septi Maryani. Skripsi, (2012) *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Bawaan*, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu)
- Setiawan, M. A. (2014). *Peran juru sita dalam upaya menghadirkan tergugat kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)*.
- Subarkah, I. (2011). *Dilematika Kekuasaan Lembaga Peradilan Dan Keadilan Dalam Frame Desentralisasi Pemerintahan (Suatu Common Sense)*. Jurnal Konstitusi, 4(1), 115493.

Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). *Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*. Jurnal USM Law Review, 6(1), 433-447.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.